

Perempuan Dalam Dimensi Kemiskinan

Menurut data PBB, 1/3 dari penduduk dunia hidup di bawah garis kemiskinan, sementara itu sekitar 70 % dari mereka adalah perempuan. Karenanya perlu dilakukan cara yang tepat guna menentaskan kemiskinan yang dialami perempuan. Di Indonesia sendiri, ada berbagai dimensi kemiskinan yang menimpa perempuan: akibat posisi tawar yang lemah di dalam masyarakat, kultur yang represif, miskin akibat bencana dan konflik, diskriminasi di ruang publik dan domestik, serta tidak pedulinya negara dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat guna menentaskan perempuan dalam kemiskinan.

Dalam kenyataannya banyak praktek diskriminasi dilakukan terhadap perempuan. Dalam dunia mikro kredit misalnya, menyebutkan bahwa bantuan mikro kredit adalah sarana yang efektif dalam membasmi kemiskinan pada perempuan, sayangnya berdasarkan data *Women's World Banking*, dana mikro kredit yang baru dikucurkan oleh pihak perbankan kepada perempuan di Indonesia masih berkisar 7 % dari jumlah keseluruhan nasabah.

Selain itu, *Human Development Report* tahun 2004 menunjukkan bahwa pembangunan gender di Indonesia amat rendah yaitu di peringkat 90. Dibandingkan dengan negara ASEAN saja Indonesia berada di peringkat terendah. Penetapan Indeks Pembangunan gender atau yang kerap disebut dengan GDI (*Gender-related Development Index*) ini mengacu antara lain angka harapan hidup, angka melek huruf, partisipasi murid sekolah, dan GDP riil per kapita pada perempuan. Berdasarkan fakta atas dasar patokan tersebut, maka data yang terekam adalah seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel : Index dan Fakta di Indonesia

No. Index	Fakta
1. Angka harapan hidup perempuan	Hasil SDKI (Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia menunjukkan bahwa AKI (Angka Kematian Ibu) di Indonesia dalam periode 1998 – 2003 amatlah tinggi yakni 307 per 100.000 kelahiran hidup.
2. Angka melek huruf perempuan	Human Development Report melaporkan bahwa angka melek huruf perempuan Indonesia atas) telah mencapai 82 % pada tahun 2000. Kendati demikian, angka ini merupakan 89 % dari jumlah laki-laki yang melek huruf dan di bawah angka melek huruf secara nasional yang dilaporkan 86,9 %. Lebih kecilnya angka melek huruf perempuan, mencerminkan rendahnya kepedulian terhadap pendidikan bahkan secara keseluruhan. Jangankan perluasan pendidikan bagi perempuan, pendidikan secara umum saja hanya mendapat porsi 7,9 persen dari total belanja Pemerintah Indonesia pada kurun 1995-1997 dan hanya 1,4 persen dari pendapatan nasional (Gross National Product/GNP).
3. Partisipasi murid perempuan	Di Indonesia dalam kurun 10 tahun terakhir partisipasi murid perempuan yang masuk SD hanya sebesar 49 % dibanding murid laki-laki, kemudian di tingkat SMP angka partisipasi perempuan menurun hingga 46 % dan di tingkat SMA kembali menurun hingga 41 % dan di tingkat universitas kembali menurun hingga tinggal 33 %.
4. Relevansi tingkat pendidikan dan kasus kekerasan	Hasil kajian LBH-APIK Kalbar tahun 1997-2003 menunjukkan bahwa rendahnya pendidikan menjadi faktor utama penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di bawah umur.
5. Penghasilan perempuan	Intepretasi hukum perkawinan yang timpang dalam UU perkawinan di Indonesia yang menyebutkan bahwa perempuan adalah ibu rumah tangga dan bukan pencari nafkah berimbang pada aturan ketenagakerjaan. Akibatnya perempuan dianggap hanya pencari nafkah tambahan, kerap menerima upah lebih rendah dari rekannya laki-laki dan tidak mendapat tunjangan.
6. Diskriminasi pasar kerja	Data dari ILO menunjukkan bahwa di Indonesia dari 51 % perempuan usia produktif hanya 37,2 % yang berhasil masuk dalam angkatan kerja. Sementara itu diskriminasi upah dan rawan eksploitasi juga masih menjadi masalah perempuan bekerja di Indonesia.
7. Kepala rumah tangga perempuan	Data BPS tahun 2000 menunjukkan dari setiap 10 rumah tangga maka 10 %nya dikepalai oleh perempuan, dari angka tersebut 80 % kepala rumah tangga adalah janda, sekitar 60 % kepala rumah tangga perempuan tidak/ belum pernah sekolah atau tidak tamat SD dan sekitar 40 % kepala rumah tangga perempuan buta huruf.
8. Rumah tangga miskin	Data BPS 1999 menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga miskin berjumlah sekitar 7,87 juta dengan komposisi sekitar 37,5 juta jiwa dimana 0,96 juta dikepalai oleh perempuan.

Kemiskinan kemudian memaksa perempuan mencari penghidupan di rantau. Celaknya tingkat perdagangan perempuan dan anak Indonesia justru meningkat tiap tahunnya. Tahun 2000 saja ditemukan fakta bahwa 74.616 orang TKI yang bekerja di luar negeri adalah korban *trafficking*. Di level negara sendiri belum ada hukum yang secara kuat menjerat para pelaku trafiking. Kesimpulannya, pembangunan di Indonesia belum berlangsung optimal, karena memberikan manfaat secara timpang atas kesejahteraan terhadap perempuan. Keadaan tersebut akhirnya menghasilkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender di segala bidang kehidupan. (AV).